

Moral pada Mural

BUKAN hanya *wong* Yogya yang doyan pelesetan.

Tak kurang dari sastrawan Carlos Fuentes dalam novelnya *Christopher Unborn* (1990) pun ikut-ikutan iseng dengan memelesetkan beberapa nama kota di dunia, menirukan para arsitek dan planolog yang nyinyir sekaligus sinis. Nama Mexico City dipelesetkan menjadi *Makesicho City* (kota yang bikin sakit). Kota San Fransisco dipelintir kemegahannya oleh warganya sendiri menjadi *Sad Fransisco* (Fransisco yang sedih). Los Angeles yang diandaikan sebagai kota bidadari menjadi *Lost Angeles* (bidadari yang hilang). Kota Manila dibercahi "nila" menjadi *Madnila*.

Pemelesetan itu berpangkal pada keprihatinan terhadap perkembangan kota-kota tersebut. Entah karena kondisi tata ruangnya yang meleset jauh dari planologi yang telah digagas jauh hari sebelumnya, atau justru konsep planologinya yang tak berakar pada kebutuhan dan kompleksitas permasalahan kota itu sendiri. Belum lagi silang-sengkarut kondisi demografi, polusi, kesenjangan sosial, kebijakan publik yang tak populer, membubungnya grafik kriminalitas dan lainnya yang memunculkan beragam kerawanan bagi penduduk kota-kota tersebut.

Merunut garis gagasan atas pelesetan tersebut, saya kira kota Jakarta pun "terpaksa" bisa dipelesetkan menjadi *Jackal-ta* (*jackal*:serigala), karena di dalamnya memang banyak "serigala" yang siap senantiasa memangsa antar-sesamanya, mulai dari cara yang eufemistik hingga yang sarkastik. Dari yang halus hingga yang ngawur. (hm, jadi ingat pepatah Latin kuno *homo homini lupus*).

Kota Medan bisa menjadi *Mad-dan*, atau slogan "Ini Me-

dan, Bung!" dapat bergeser begitu sangar sebagai "Ini *edan*, Bung". Pelesetan ini tentu sangat tepat titik relevansinya karena angka kriminalitas di Medan yang begitu tinggi tiap tahun. Semarang pun lama-lama bisa menjadi kota *Sembarang* (*an*) karena beragam kebijakan untuk publik yang diatur oleh aparatus kotanya atau aktivitas dari sebagian warganya tak jarang dilakukan tanpa banyak dipikir dampak jangka panjangnya. Nyaris dilakukan dengan *sembrono* dan sembarangan. Seperti misalnya pembangunan reastat atau perumahan di banyak punggung bukit gundul yang berakibat tanah longsor.

Lalu bagaimana dengan kota Yogya?

Saya merasa kesulitan untuk membuat pelesetan atas kota Yogya yang segala kisi-kisinya nyaris sudah rimbun dengan kultur pelesetan. Ada Dagadu yang dihidupi oleh denyut pelesetan sebagai oksigen kreatifnya. Ada teater Gandrik, ada Dagelan Mataram Barunya Bondan Nusantara yang *ndesa* tapi cerdas. Ada orkes keroncong Sinten Remen atau Kua Etnika-nya Djaduk Ferianto, atau perupa kosmopolitan kelas dunia Heri Dono yang sadar atau tak sadar melesatkan diri dari busur tradisi yang dipelesetkan dalam pigura reaktualisasi dan modernisasi. *Mainframe*-nya tetap sebagai pelesetan yang penuh kebaruan kreatif.

Pelesetan yang muncul di Yogya selama ini sudah menulangsungsum. Bahkan pelesetan sudah sangat substansial dan mungkin -- biar terdengar lebih "heroik" -- telah ideologis masuk dalam perikehidupan banyak warga Yogya. *Pelesetan is*

our way of life!

Tetapi kalau dalam beberapa bulan terakhir ini kita saksikan upaya Pemkot (pemerintahan kota) Yogya yang membangun pot-pot raksasa, taman di ujung selatan Malioboro, tiang bendera atau beragam lampu hias di beberapa kujur kota, plus sembronnya mengakomodasi pemajangan billboard iklan yang bikin *crowded*, barangkali inilah pelesetan norak versi pemkot. Yogya di *agjog* (dituangi berkali-kali) dan jadi tempat *agjagan* (diinjak-injak seenaknya) oleh "konsep" tata kota yang nyaris tanpa konsep. Tak kelihatan kreativitas gaya Yogya yang akrab dan humanis.

Saya katakan sembron karena pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot telah menyingkirkan ruang publik yang selama ini menjadi salah satu roh penting dikawasan ujung selatan Malioboro. Publik seolah dihilangkan storitas kepemilikan atas kotanya karena sama sekali tak ada *public hearing*, dialog atau tegur-sapa apapun yang memungkinkan opini masyarakat diresepsi oleh aparatus kota.

Konsep pembangunanisme yang dulu diterapkan oleh rezim Orde Baru masih kuat berkerumun di batok kepala Pemkot. Pembangunan selalu diartikan secara sempit sebagai membangun dalam konteks fisik saja. Kalau pembangunan tersebut diasumsikan semata-mata untuk menyingkirkan para pedagang kaki lima yang juga merebut lahan ruang publik, maka counter yang dilakukan Pemkot pun seyogyanya bukan dengan cara yang fisik juga. Pendekatan persuasif masih banyak caranya, yang belum dilakukan

Pemkot dengan sungguh-sungguh.

Maka kiranya menarik kalau pada rentang waktu yang bersamaan --dalam beberapa bulan terakhir ini-- sekelompok seniman rupa/perupa yang dikoordinir oleh komunitas Apotik Komik, berinisiatif memberi warna lain pada sebagian ruang publik dengan lukisan dinding atau mural. Karya-karya mereka ada di jembatan layang Lempuyangan, Jalan Yohanes (sebelah timur Mal Galeria), Jalan Perwakilan, sebelah selatan toko batik Margaria dan lainnya.

Mereka hadir seperti keli-kili kepekaan pemkot atas pemanfaatan ruang publik. Badan jembatan layang yang bertahun-tahun tak tersentuh oleh satu senpun budget untuk merapkannya, justru dibenahi oleh anak-anak muda itu dengan prakarsa yang kreatif: membuat mural! Mereka dengan santun meminta izin kepada walikota sebagai pemegang otoritas formal kota, tetapi tak merengket memohon bantuan atau kompensasi finansial apapun. (Namun menurut anak-anak muda itu, mereka belakangan akan diberi bantuan oleh Pemkot sebesar Rp 5 juta dan dipotong "uang tanda tangan" sehingga jumlah bersih yang diterimakan hanya sebesar Rp 1,5 juta. Para seniman pun menolok. Bagus!).

Pembuatan mural yang melibatkan puluhan perupa itu saya kira mengguratkan beberapa poin penting atas kehadirannya. Pertama, estetisasi kehidupan sehari-hari. Pada kasus ini, seniman mencoba menempatkan benda-benda keseharian yang selama ini berjarak dari citra seni, justru dirangkul dan diposisikan sebagai subyek dan

medium karya seni.

Kedua, popularisasi karya seni. Sebagai kota budaya yang produktif melahirkan seniman tiap jaman, publik Yogya relatif masih belum akrab dengan karya seni rupa. Maka karya mural merupakan bentuk penciptaan ruang pajang yang memungkinkannya untuk mengenalkan dan mempopulerkan karya seni. Jembatan Layang adalah galeri seni rupa yang bisa langsung diakses dan diapresiasi oleh masyarakat luas di ruang publik.

Dua poin di atas sekaligus memberi tantangan atas adanya asumsi karya seni rupa yang eksklusif dan hirarkis.

Ketiga, memberi pembelajaran terhadap penggraffiti liar. Para penggraffiti dipersuasi untuk bisa "berbagi" ruang dengan perupa dalam mengekspresikan identitas personal, kelompok dan spirit "kreatif"nya.

Mereka, idealnya bisa memiliki kesadaran untuk berbagi, untuk tidak menjadi rezim atas ruang publik.

Keempat, memberi moral penyadaran dan pendewasaan terhadap pemilik otoritas kota. Modus munculnya karya mural berasal dari publik, bukan inisiatif dari atas. Maka, titik moralnya, alangkah ideal andai setiap keputusan yang akan bersangkutan dengan kepentingan publik, Pemkot selalu legawa untuk melibatkan elemen publik di dalamnya.

Hasil faktual yang bersamasamakita lihat, "karya-karya" hasil inisiatif Pemkot nyaris selalu berjarak dengan kemauan publik, berbiaya mahal (baca: dimahalmahkan), dan acap merupakan "karya" pelesetan yang kering, mubazir dan tidak cerdas.

Kasihankah dikau, Lik Pemkot! (*)
Kuss Indarto, *alumnus Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta dan penggiat seni pada Jogja Fine Art Community*